

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target masing-masing sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 maupun Rencana Kinerja Perubahan Tahunan 2019. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>95% s/d 100%	: Sangat Berhasil.
>80% s/d 95%	: Berhasil.
>50% s/d 80%	: Cukup Berhasil.
< 50%	: Tidak Berhasil.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Misi

No	Uraian Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Rata-rata Capaian (%)	Predikat
A. Misi Satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	0	Akan dinilai tahun 2020
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	103,23	Sangat Berhasil
B. Misi Tiga : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.				
1.	Meningkatnya keberdayaan lembaga koperasi	2	110,11	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan keberdayaan UMKM	2	104,16	Sangat Berhasil

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Uraian pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 secara rinci sebagai berikut:

a. MISI SATU: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

1) SASARAN SATU, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan hasil pencapaian masih kosong, karena belum ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten dan Bagian Organisasi Setda, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Penghitungan Pencapaian Sasaran Misi Satu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	--	Akan dinilai tahun 2020
2.	Predikat LAKjIP	A	A	--	Akan dinilai tahun 2020
	Rata-rata capaian kinerja			--	--

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten, dengan demikian predikatnya belum dapat dilaporkan.

Dicapai melalui satu program yaitu:

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Membuat SOP dan analisis resiko pada kegiatan yang dianggap strategis dan prioritas yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Komitmen dan semangat dari Tim atau aparatur pengelola keuangan untuk mentaati aturan yang ada sangat tinggi.
3. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik.

Sedangkan yang masih menjadi hambatan adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

Strategi pemecahan masalah:

1. Dalam apel pagi hari Senin maupun di dalam rapat dengan pejabat struktural/staf, Kepala Dinas selalu menghimbau agar target keuangan dan fisik tiap bulan yang telah dibuat oleh masing-masing koordinator dapat direalisasikan sesuai perencanaan awal.

2. Masing-masing Kepala Seksi/ Kasubbag agar bekerja secara profesional, transparan, jujur, bertanggungjawab, dan jika menemui masalah segera dikomunikasikan di tingkat dinas untuk mencari solusi, jika diperlukan dapat minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
3. ASN hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat, oleh sebab itu aturan yang ada supaya ditaati untuk meminimalisir resiko suatu pekerjaan, dengan cara bekerja secara profesional, transparan, jujur, semangat dan jika menemui masalah segera dikomunikasikan di tingkat dinas untuk mencari solusi dan jika diperlukan minta pendampingan dari instansi teknis terkait.
4. Mengingat terbatasnya SDM yang ada dan tuntutan tanggung jawab akan tugas yang dilaksanakan, pekerjaan yang penting/ mendesak sering dikerjakan di luar jam kerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 2 (dua), predikat LKjIP dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi.

Capaian indikator predikat LKjIP belum ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten, dengan demikian predikatnya belum dapat dilaporkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, adalah:

1. Menentukan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Membuat dan menjabarkan proses bisnis

Sedangkan hambatannya antara lain :

1. Belum semua pelaku usaha masuk dalam aplikasi satu data UMKM.
2. Pengelolaan data UMKM masih ditangani secara parsial oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi Pemecahan Masalah:

1. Menambah kegiatan baru di tahun 2019 yaitu pengkajian dan pengembangan sistem informasi, *output* dari kegiatan ini berupa pengembangan sistem satu data UMKM.
2. Adanya kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, berupa aplikasi satu data UMKM dapat meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor. Termasuk menganggarkan tambahan tenaga 1 orang non PNS untuk formasi jabatan pengelola data kreativitas dan inovasi.

- 2). SASARAN DUA: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan hasil pencapaian 103,23% predikat Sangat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penghitungan Pencapaian Sasaran Misi Satu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,87%	83,87%	86,58%	103,23
	Rata-rata capaian kinerja				103,23

Indikator Kinerja Sasaran nomor urut 1 (satu), Indeks Kepuasan Masyarakat dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
4. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
5. Pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat atas pelayanan di Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan mengajukan 9 pertanyaan kepada responden.

Indikator indeks kepuasan masyarakat yang didukung oleh program/kegiatan, diasumsikan untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran, terdapat 2 unsur pelayanan dalam survey yang mendapatkan nilai skor tertinggi, dengan sebutan baik adalah:

1. Tidak dipungut biaya pelayanan dan
2. Kesopanan dan keramahan pelayanan.

Sedangkan 2 unsur pelayanan lainnya yang masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut antara lain :

1. Ruang pertemuan/ aula dinas terlalu sempit
2. Tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 kurang luas.

Strategi Pemecahan Masalah:

1. Koordinasi dengan BKAD, Perindag dan Bappeda apabila akan menyelenggarakan acara dengan jumlah peserta yang melebihi kapasitas, untuk berkenan meminjamkan aula dan tempat parkir.
2. Mengusulkan pembangunan tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 yang representatif agar tidak kepanasan dan kehujanan.

b. MISI TIGA : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

- 1) SASARAN PERTAMA: Meningkatnya keberdayaan lembaga Koperasi, dengan hasil pencapaian 105,22% dengan predikat Sangat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Penghitungan Pencapaian Sasaran Dua, Misi Tiga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Koperasi yang terbentuk per tahun	11 BH	10 BH	12 BH	120,00
2.	Presentase koperasi aktif	93,01%	93,20%	93,41%	100,22

	Jumlah capaian rata-rata				110,11
--	--------------------------	--	--	--	--------

INDIKATOR KINERJA SASARAN nomor urut 1 (satu), Koperasi yang terbentuk per tahun, dicapai melalui satu program yaitu:

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk melegalkan usahanya.
2. Dinas melakukan kegiatan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan pemahaman ke masyarakat tentang aturan perundangan dan prinsip-prinsip perkoperasian.

Hambatan yang ditemui adalah :

1. Jumlah personil pembina koperasi masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah koperasi yang dibina (data akhir tahun 2019 tercatat 410 koperasi).
2. Pajak untuk koperasi dan UMKM dihitung $0,5\% \times \text{volume usaha/omset}$ (jika omset dibawah 4,8 milyar), dan jika SHU koperasi/UMKM diatas 4,8 milyar, maka masih akan dikenakan pajak progresif maksimal 30%nya.

Hal ini dirasa memberatkan bagi gerakan koperasi, karena koperasi harus menanggung pajak SHU bagian anggota sebesar 10%, sehingga perhitungan pajak PPhnya ganda.

Strategi pemecahan masalah:

1. Guna mengatasi masalah keterbatasan personil, dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi, praktisi dan berbagai assosiasi yang menguasai permasalahan koperasi dan UMKM guna menjadi mitra dalam berbagai kegiatan/pelatihan.
2. Melakukan kordinasi dengan pusat, sambil menunggu peraturan regulasi baru.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di Bidang Koperasi 2019 sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Nama Kejuaraan	Peringkat	Penyelenggara	Ket
1.	Drs. Pustopo	Dinas Koperasi UKM Kab. Sleman	Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.	---	Kementerian Koperasi dan UKM	Nasional
2.	KSP CU. Dharma Baktri	Jaten, Sendangadi, Mlati, Sleman.	Koperasi Berprestasi Tingkat DIY (Simpan Pinjam)	Juara 1	Dinas Kop dan UKM DIY	Provinsi
3.	KPRI. Mapan Sejahtera UNY	Kampus UNY, jln Colombo Depok, Sleman	Kop Berprestasi Tingkat DIY (kop. konsumen)	Juara 1	Dinas Kop dan UKM DIY	Prrovinsi
4.	Koperasi Karyawan PT. Medaridoteks	Jln.Magelang, Medari, Caturharjo, Medari, Sleman.	Kop Berprestasi Tingkat DIY (kop. pemasaran)	Juara 1	Dinas Kop dan UKM DIY	Provinsi

INDIKATOR KINERJA SASARAN, nomor urut 2 (dua) persentase koperasi yang aktif, dicapai melalui satu program yaitu:

- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Dinas melakukan usaha peningkatan kualitas kelembagaan koperasi berupa kegiatan : pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan pengembangan kapasitas SDM koperasi.

Sedangkan hambatan/kendala adalah:

1. Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal.
2. Sebagian besar koperasi hanya mengandalkan aturan main Anggaran Dasar, dan belum melengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.

3. Masih banyak gerakan koperasi yang belum memiliki visi modern dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Dinas telah membuat panduan tertulis dan berbagai kebijakan sebagai bekal bagi petugas yang akan turun lapangan. Disamping itu menyelenggarakan berbagai pelatihan, pendampingan dan temu usaha koperasi guna meningkatkan jaringan usaha koperasi dalam era globalisasi.
2. Dalam setiap penyuluhan, pelatihan ataupun ketika mengadakan kunjungan ke gerakan koperasi, petugas tak henti-hentinya menghimbau kepada pengurus agar melengkapi koperasi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus, agar semua aturan main koperasi terekapitulasi dengan baik.
3. Ke depan diharapkan koperasi bergerak ke sektor rill, tidak semata-mata mengandalkan usaha simpan pinjam dan pelayanan kepada anggota mengarah kepada e-banking.

- 2) SASARAN KEDUA, Meningkatnya keberdayaan UMKM, dengan hasil pencapaian 104,16% dengan predikat Sangat Berhasil diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Penghitungan Pencapaian Sasaran dua, Misi Tiga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi (2018)	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan aksesibilitas UMKM	49	24	26	108,33%
2.	Jumlah Wirausaha baru	130	135	135	100,00%
	Jumlah capaian rata-rata				104,16

INDIKATOR KINERJA SASARAN, nomor urut 1 (satu), Peningkatan aksesibilitas UMKM dicapai melalui satu program sebagai berikut:

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pada era sebelumnya tahun 2017 dan 2018 peningkatan aksesibilitas UMKM per tahun ditargetkan 45 UMKM, hal ini disebabkan yang mengampu indikator ini ada di 2 bidang yaitu Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, dengan sasaran untuk gerakan koperasi dan UMKM. Tetapi mulai tahun 2019 indikator peningkatan aksesibilitas UMKM hanya ditangani oleh satu bidang yaitu Bidang Usaha Mikro, dengan demikian targetnya disesuaikan dari semula 45 koperasi dan UMKM menjadi 24 UMKM, dengan sasaran khusus untuk UMKM, 1 program diarahkan untuk satu bidang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Sosialisasi penguatan modal bagi UMKM semakin ditingkatkan frekwensinya.
2. Pelaku usaha masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Hambatan yang masih ditemui adalah :

1. Bunga pinjaman penguatan modal APBD sebesar 6% tahun flat, lebih mahal bila dibandingkan dengan bunga KUR 7% pertahun dengan bunga menurun kalau dirata-rata perbulan hanya 0,3%.

Strategi pemecahan masalah:

1. Mengusulkan kajian berkaitan regulasi penguatan modal, jika dimungkinkan bunganya diturunkan dibawah 6% dan jangka waktu pinjaman diperpanjang.

INDIKATOR KINERJA SASARAN, nomor urut 2 (dua) jumlah wirausaha baru, dicapai melalui satu program yaitu:

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Capaian indikator Jumlah wirausaha baru mencapai 100,00%.

Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku lokal dan munculnya paradigma baru bagi pelaku usaha generasi muda yang siap

untuk menerima tantangan memasuki dunia kerja dengan berbagai terobosan yang menarik.

2. Kondisi wilayah Sleman yang sangat strategis dan mendukung untuk berwirausaha, hal ini diperkuat dengan banyaknya kampus di wilayah kabupaten Sleman dan adanya beberapa obyek wisata yang menarik.

Sedangkan yang masih menjadi hambatan/kendala adalah:

1. Usulan kegiatan PUPM berkaitan dengan pelatihan, dalam pelaksanaan terkadang jumlah pesertanya kurang terpenuhi karena peserta pelatihan yang mengusulkan dari desa/kecamatan setempat.
2. Belum adanya pemetaan UMKM di setiap kecamatan sehingga data UMKM belum sepenuhnya valid, misal pelaku usaha sdh pernah mengikuti pelatihan/bimtek apa saja, dan pelatihan/bimtek apa yang masih dibutuhkan ke depan.

Strategi Pemecahan masalah :

1. Mengkomunikasikan dengan pihak kecamatan dan desa, ditindaklanjuti dengan menyurati desa/dusun yang mengusulkan pelatihan, supaya menyiapkan pesertanya lebih selektif.
2. Menginventarisir peserta pelatihan dan mengelompokkan dalam berbagai jenis pelatihan, apa saja yang masih dibutuhkan dalam aplikasi satu data UMKM.

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di Bidang Usaha Mikro.

Pemerintah Kabupaten Sleman menerima penghargaan Natamukti Award dengan kategori Natamukti Nindya, karena dinilai telah berhasil mengembangkan UMKM secara komprehensif dari organisasi "*International for Small Businnes (ICSB)*"

Penghargaan disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Prof Rully Indarta didampingi presiden ICSB Indonesia kepada Bupati

Sleman Sri Purnomo, dalam acara Galang UKM Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2019 di IPB Convention Center Kota Bogor.

Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya kabupaten yang menerima penghargaan dengan kategori Natamukti Nindya, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam meningkatkan daya saing UMKM baik regional maupun internasional.

3.2. REALISASI/ CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

Realisasi/ capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi/capaian kinerja tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2018	Keterangan
1	2	3	4	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	➢ Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditinjakanjuti	---	100%	Realisasi 2019 akan dinilai 2020
	➢ Predikat LAKJIP	---	A+	Realisasi 2019 akan dinilai 2020
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	➢ Indeks Kepuasan Masyarakat	86,58	83,87%	
Meningkatnya keberdayaan lembaga koperasi	➢ Koperasi yang terbentuk per tahun	12 koperasi	11 koperasi	
	➢ Persentase koperasi aktif	93,41%	93,01%	
Meningkatnya keberdayaan UMKM kualitas kelembagaan	➢ Peningkatan akseibilitas UMKM	26 UMKM	49 UMKM	
	➢ Jumlah wirausaha baru	135 wirausaha baru	130 wirausaha baru	

3.3. REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kinerja bersumber dari Renstra Dinas. Kementerian Koperasi dan UKM belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja

sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja tahun 2019	Target Kinerja tahun 2021
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditinjaulanjuti ➢ Predikat LAKIP 	<p>Akan dinilai di tahun 2020.</p> <p>Akan dinilai di tahun 2020</p>	<p>100%</p> <p>A</p>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks Kepuasan Masyarakat 	86,58%	84,00%
Meningkatnya keberdayaan lembaga koperasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koperasi yang terbentuk per tahun 	12 koperasi	10 koperasi (terbentuknya koperasi baru setiap tahun)
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase koperasi aktif 	93,41%	93,75%
Meningkatnya keberdayaan UMKM kualitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan aksesibilitas UMKM 	24 UMKM	24 UMKM (mulai tahun 2019-2021, setiap tahun target aksesibilitas yang ditetapkan 24 UMKM)

3.4. REALISASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 DENGAN REALISASI KINERJA PROVINSI DAN TARGET NASIONAL

Acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kinerja bersumber dari Renstra Dinas. Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi UKM provinsi DIY, belum menetapkan standar berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar provinsi dan nasional dimaksud.

3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKAT-AN/PENURUNAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari 6 uraian indikator kinerja, 4 diantaranya mendapatkan predikat sangat berhasil.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian sasaran IKU adalah:

1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk berwirausaha.
2. Kemudahan memperoleh bahan baku lokal.
3. Promosi produk diantaranya melalui keikutsertaan pada pameran berskala lokal, regional dan nasional.
4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi dan ijin berusaha.
5. Perkembangan wilayah Kabupaten Sleman yang menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA (SDM, KEUANGAN, ASET DAN SEBAGAINYA)

Jumlah binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada akhir tahun 2019 sebanyak 410 koperasi dan 41.852 UMKM , bila dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dinas (29 PNS, 3 tenaga non PNS DAK, 4 tenaga non PNS APBD, 7 outsourcing keamanan, 3 outsourcing kebersihan, 1 outsourcing driver) masihlah belum mencukupi, oleh sebab itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, akademisi, praktisi dan berbagai assosiasi yang menguasai koperasi dan UMKM untuk turut terlibat membangun dan memajukan sektor ini.

Demikian halnya efisiensi di bidang keuangan telah dilakukan, dengan cara tidak semua pelaksanaan kegiatan menggunakan harga yang maksimal di Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sepanjang memungkinkan memakai harga di bawah standar yang tertuang di SHBJ dan DPA, namun tetap tidak mengurangi kualitas serta klasifikasi yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan aset yang dimiliki, sekalipun masih dalam keterbatasan karena merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru, namun Dinas

berusaha untuk tetap merawat dengan baik agar penggunaannya lebih optimal.

3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJUANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN/OUTCOME.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Dari anggaran sebesar Rp. 8.774.574.757. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.134.989.000. terealisasi sebesar Rp. 2.015.864.409. atau 94,41%.

Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.639.585.757. terealisasi sebesar Rp. 6.330.274.164. atau realisasi keuangannya mencapai 95,34% dan realisasi fisiknya mencapai 100,00 %.

Belanja langsung dimaksud dialokasikan untuk melaksanakan 7 urusan, 9 program yang meliputi 25 kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019, anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sebagai berikut:

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEU (%)	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	128.407.750.	128.208.750.	99,85%	100%
2	Pengelolaan informasi publik perangkat daerah	269.741.400.	261.905.400.	97,09%	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.200.000.	57.600.000	97,30%	100%
4	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan	329.573.525.	310.904.550.	94,34%	100%
5	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	599.338.600.	558.336.116.	93,16%	100%
6	Pemeliharaan rutin berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesir dan meubelair	889.401.452.	851.293.006.	95,72%	100%
7	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	34.061.000.	32.522.000.	95,48%	100%

8	Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja PD	68.145.000.	64.824.000.	95,13%	100%
9	Pemberdayaan koperasi	210.759.900.	200.773.800.	95,26%	100%
10	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	976.871.500.	964.703.375.	98,75%	100%
11	Pengembangan sarana promosi hasil produksi	297.803.010.	283.426.174.	95,17%	100%
12	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	334.778.050.	323.539.550.	96,64%	100%
13	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	261.746.750.	213.295.250.	81,49%	100%
14	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	468.240.880.	428.943.080.	91,61%	100%
15	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	29.715.600.	29.098.600.	97,92%	100%
16	Penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	64.382.200.	62.329.400.	96,81%	100%
17	Pembangunan sistem informasi perencanaan, pengembangan perkoperasian	70.861.200.	67.578.200.	95,37%	100%
18	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	219.578.000.	213.559.120.	97,26%	100%
19	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	653.868.400.	629.030.631.	96,20%	100%
20	Pengembangan kapasitas SDM koperasi	433.519.900.	420.067.100.	96,90%	100%
21	Pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah	42.268.750.	41.785.950.	98,86%	100%
22	Pengelolaan dokumen SKPD	21.006.890.	20.570.000.	97,92%	100%
23	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	19.455.000.	13.315.000.	68,64%	100%
24.	Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal	143.226.000.	141.250.112.	98,62%	100%
25	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.	13.635.000.	11.415.000.	83,72%	100%
	Jumlah	6.639.585.757.	6.330.274.164.	95,34%	100%

BAB IV

PENUTUP

Semula anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas tahun 2019 sebesar Rp. 8.079.028.275. yang meliputi Belanja tidak Langsung Rp. 2.134.989.000. dan Belanja Langsung Rp. 5.944.039.275.

Namun pada anggaran perubahan berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Nomor : 39/1.02.11.01/Kep.KaBKAD/DPPA-SKPD/2019 tanggal 15 Agustus 2019 mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp. 8.774.574.757. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 2.134.989.000. dan Belanja Langsung Rp. 6.639.585.757.

Belanja Tidak Langsung realisasinya mencapai Rp. 2.015.846.409 atau terealisasi sebesar 94,41%. Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 6.330.274.164. atau realisasi keuangan mencapai 95,34% dan fisiknya mencapai 100%. Belanja langsung dimaksud untuk melaksanakan 7 urusan, 9 program yang meliputi 25 kegiatan. Secara umum pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Desember 2019 berjalan dengan lancar.

A. KESIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 berjalan dengan lancar, dari target fisik yang ditetapkan 100% tercapai 100%, dan target keuangan yang ditetapkan 100% tercapai 95,34% dengan demikian capaian kinerja fisik 100% dan capaian kinerja keuangan 95,34%.
2. minimya minat generasi muda untuk bekerja di koperasi dan menjadi wirausahawan.
3. Terbatasnya kompetisi SDM Koperasi dan UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar.
4. Koperasi belum mempunyai visi modern dan mayoritas usahanya masih simpan pinjam, serta belum maksimal dalam melakukan reorientasi usaha ke sektor riil.

5. Militansi anggota terhadap koperasi rendah dan sebagian manajer/ pengelola koperasi belum memiliki sertifikasi uji kompetensi..
6. Supporting pinjaman penguatan modal belum optimal (bunga 6% per tahun flat), lebih mahal bila dibanding dengan bunga KUR 7% per tahun dengan bunga menurun sehingga rata-rata perbulan 0,3%.
7. Usaha koperasi masih kalah bersaing dengan perbankan/ jasa keuangan lainnya.
8. Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Mandiri, belum optimal.
9. Jaringan kemitraan UMKM dalam pengembangan pasar masih rendah.
10. Belum terintegrasinya OPD pembina UMKM dalam mengembangkan usaha.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJANYA:

1. Prestasi yang diraih adalah berkat semangat dari Tim dan kerjasama dari semua pihak, untuk hal itu ke depan agar tetap dipertahankan.
2. Mengenalkan koperasi sejak dini, diawali dari murid TK dan SD dengan mengikutkan lomba mewarnai dan menggambar logo koperasi pada acara hari jadi koperasi di tingkat kabupaten/ provinsi atau pada event-event lainnya. Khusus pelajar SLTP, SLTA serta mahasiswa diarahkan pada kegiatan lomba tangkas terampil.
Untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan, Dinas bekerjasama dengan beberapa sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan selama 3 hari berturut-turut, dengan sasaran pelatihan para siswa-siswi pelajar SLTA.
3. Melakukan pelatihan peningkatan produk yang berkualitas agar memiliki daya saing untuk dapat menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi dan jaringan. Sasaran pelatihan melibatkan pelaku usaha/ masyarakat yang sudah maju/terampil, KK miskin, kaum difabel, pengurus keutamaan gender dan pelaku usaha/kelompok baru.
4. Tahun 2017 terdapat 3 program strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu : Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan.

Rehabilitasi adalah penataan koperasi termasuk pengaktifan dan pembubaran koperasi. Reorientasi adalah merubah paradigma dari kuantitas koperasi menjadi kualitas koperasi. Sedangkan Pengembangan adalah koperasi yang telah naik kelas dan koperasi yang menuju modern.

Ketiga program strategis dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Dinas, terlihat mulai tahun 2017 jumlah koperasi semakin menurun setiap tahunnya dikarenakan adanya pembubaran koperasi.

Demikian halnya dengan volume usaha, sisa hasil usaha dan aset mulai tahun 2019 mengalami penurunan karena ada beberapa koperasi yang naik kelas dari kabupaten ke tingkat provinsi ataupun dari kabupaten naik kelas ke tingkat nasional.

5. Ajakan kepada anggota koperasi untuk turut berpartisipasi mencintai produk koperasi dan menghimbau kepada anggota jika belanja supaya di toko koperasi.
Menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi manajer/ pengelola koperasi.
6. Mengusulkan kajian peraturan perundang-undangan (Perda) berkaitan dengan regulasi pinjaman penguatan modal APBD.
7. Ada wacana dari gerakan koperasi distribusi KUR diarahkan melalui lembaga koperasi, setelah itu baru didistribusikan kepada masyarakat.
8. Mengoptimalkan Lembaga PLUT Mandiri, mengusulkan kegiatan, sarana dan prasarana, serta mengikutkan diklat bagi 5 konsultannya yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
9. Menyelenggarakan temu usaha, temu kemitraan dan pameran agar dapat terjalin jaringan kemitraan bagi UMKM.
10. Perlunya OPD pembina UMKM duduk bersama untuk merumuskan kewenangan dan pengembangan usaha UKM, sesuai tupoksi.

